

BAB II

SEJARAH HUBUNGAN BILATERAL IRAN DAN TIONGKOK

Terjalannya hubungan antar negara tidak terlepas dari adanya kepentingan nasional, sehingga satu negara saling membutuhkan dengan negara yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Selain suatu negara mencari sumber daya yang tidak tersedia dalam negerinya, hubungan suatu negara juga tidak terlepas oleh sejarah masa lalu. Dalam bab ini penulis akan mencoba menggambarkan sejarah hubungan bilateral antara Iran dan Tiongkok, dan juga bagaimana diplomasi yang terjadi antara kedua negara.

A. Sejarah Berdirinya Iran

Negara Iran pertama kali adalah kekaisaran Achaemenian, yang didirikan Oleh Cyrus Agung sekitar 550 sebelum masehi. Alexander Agung mengalahkan kekaisaran pada tahun 330 sebelum masehi. Orang-orang Yunani diikuti oleh Parthia, yang memerintah dari 247 SM sampai 224 sebelum masehi, dan orang-orang Sassanius yang memerintah dari tahun 224 SM sampai pada akhirnya orang-orang Arab menaklukkan Iran pada 642 masehi. Orang arab yang masuk ke Iran bersamaan dengan Islam sehingga menjadi agama yang dominan. Pada abad-abad berikutnya Iran dikuasai oleh dinasti Arab, Iran dan Turki, pada abad ke tiga belas pemimpin mongol menyerang Iran, dan dinasti Mongol menguasai Iran hampir dua abad lamanya. Pada tahun 1501, Iran mendirikan kerajaan terpusat yang kuat dibawah Ismael I dan juga menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi.²¹

Dalam peta dunia Islam, Iran merupakan representasi kawasan Persia dengan penduduk mayoritas menganut paham Syiah Imamiyah. Paham Syiah Imamiyah mendapat tempat yang istimewa sebagai mazhab resmi negara sejak berdirinya

²¹ (<https://www.loc.gov>, 2008)

dinasti Shafawi tahun 1501. Sejak itu, ajaran Syiah Imamiyah memberikan pengaruh secara dominant dalam struktur sosial dan kehidupan masyarakat Iran. Mazhab Syiah Imamiyah semakin memperlihatkan pengaruhnya pada bangsa Iran, khususnya pasca terajdinya Revolusi Islam Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini dan berhasil menggulingkan dinasti Pahlevi dan menggantinya dengan bentuk Republik Islam dan sistem Wilayah al-Faqih sebagai sistem pemerintahannya yang diadopsi dari sistem Imamah dalam keyakinan Syiah Imamiyah.

Sejak revolusi Islam 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, Iran pun mengukir sejarah baru dalam babakan sejarah politiknya, menjadi Republik Islam dengan sistem Wilayah al-Faqih sebagai sistem pemerintahannya. Dari segi politik, Iran menampilkan corak yang khas dalam pemikiran dan sistem politik Islam dengan kepemimpinan Negara yang dipegang oleh para ulama (mullah). Sistem Wilayah al-Faqih merupakan ijihad politik dari Ayatullah Khomeini yang didasarkan pada doktrin Imamah dalam Syiah Imamiyah. Keberhasilan revolusi Islam 1979 ini cukup mempengaruhi bangkitnya kesadaran politik dan rasa percaya diri bangsa-bangsa muslim di dunia. Sebuah bangsa dengan pemerintahan dinasti yang berlangsung selama 25 abad yang disokong oleh kekuatan Amerika Serikat dan Inggris akhirnya dapat tumbang dengan kekuatan massa yang dipelopori oleh para Mullah. Akhirnya, Iran kemudian menjadi negara Syiah pertama yang mendasarkan bentuk dan sistem pemerintahan negaranya pada konsep politik Syiah Imamiyah.²²

Proses pembentukan pemerintahan bangsa Iran sebagai negara modern dengan sistem pemerintahan yang mulai modern, yakni pada masa dinasti Shafawi (1507-1736) dan dinasti Qajar (1779-1925). Di masa pemerintahan Shafawi, karakteristik sosial dan pemerintahan kental dengan penerapan ortodoksi agama dengan sufisme dengan corak Syiah yang sangat kental. Wilayah Iran mulai mendapatkan campur

²² (Thohir, 2009, hal. 190)

tangan Eropa terutama Inggris pada tahun 1779 berbarengan dengan berdirinya dinasti Qajar oleh Agha Muhammad Qajar pada tahun 1779. Sejak tahun 1906, Iran (pada saat itu di bawah dinasti Qajar) telah menjadi negara monarki konstitusional dengan pembentukan dewan legislatif yang terdiri atas 200 anggota serta Majelis Tinggi yang terdiri atas 60 anggota (30 ditunjuk oleh Shah dan 30 lainnya dipilih melalui proses pemilihan).²³

Pada tahun 1925 dinasti Qajar jatuh dan digantikan oleh dinasti Pahlevi yang berkuasa hingga 1979. Titik balik terpenting dalam sejarah Iran adalah tumbangannya kekuasaan dinasti dengan model pemerintahan monarki yang telah bertahan selama lebih dari 25 abad pada bulan Februari 1979 melalui sebuah proses revolusi yang disebut dengan Revolusi Islam Iran. Revolusi yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini tersebut berhasil merubah negara Iran menjadi negara modern dengan sebutan Republik Islam Iran dengan sistem Wilayah al-Faqih di mana kekuasaan dipegang oleh otoritas wali faqih (ulama) sebagai pemimpin tertinggi pada wilayah agama dan politik. Di sini kemudian tidak dikenal dikotomi antara pemimpin politik dan pemimpin agama, semuanya terpusat pada wali faqih. 9 Selama masa-masa awal revolusi, Iran mengalami masa-masa yang cukup sulit, terutama dengan peristiwa perang Iran-Irak selama 8 tahun (1980-1988). Perang ini cukup menguras energi dan banyak menelan kerugian serta korban pada bangsa Iran. Namun perang Iran-Irak ternyata tidak cukup mampu menggoyahkan eksistensi Republik Islam Iran yang baru saja terbentuk. Bangsa Iran, kemudian lambat laun mulai membangun kekuatannya pada setiap lini penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantara ilmu pengetahuan dan militer. Hingga kini, bangsa Iran menjadi salah satu bangsa/negara muslim yang eksistensinya cukup disegani oleh masyarakat dunia internasional termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan sekutunya yakni Israel.²⁴

²³ (Morgan, 1988, hal. 133)

²⁴ *Ibid*

Iran sebagai negara dengan penganut Syiah terbesar di dunia, bukan hanya menjadikan Islam dengan mazhab Syiah sebagai anutan teologis dan ritual, tapi ajaran Syiah cukup mendominasi dalam kehidupan sosial dan pemerintahan bangsa Iran. Awalnya bangsa Iran adalah penganut Sunni mazhab Hanafi dan Syafi'I, dan selama beberapa waktu penganut keduanya mengalami pertikaian yang sengit. Mazhab Syiah mulai dianut secara massif ketika masa penguasaan bangsa Mongol di Iran sekitar tahun 1219-1353 M. Awalnya dari penguasa kedua bangsa Mongol di Iran yaitu Oijeitu yang awalnya menganut agama Shamanisme namun kemudian masuk Islam (Sunni). Ketika melihat pertikaian sengit antara penganut Hanafi dan Syafi'I, membuat Oijeitu marah dan mempertimbangkan untuk kembali pada agama Shamanisme, namun karena pengaruh salah seorang teolog Syiah, yaitu Ibnu Muthahhar Hilli, ia kemudian memutuskan untuk mennganut mazhab Syiah dan menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi negara. Keputusan ini menuai kontroversi bahkan konflik termasuk dengan putranya sendiri yang kemudian menjadi penerusnya, yaitu Abu Sa'id. Pada masa selanjutnya hingga masa pemerintahan Shafawi pergolakan terus terjadi, meski kaisar-kaisar setelahnya pada umumnya menganut mazhab Sunni.²⁵

Negara Iran adalah sebuah kawasan yang didominasi oleh pengikut Syiah Imamiyah dan menjadi negara dengan penganut Syiah terbesar di dunia. Sejak berdirinya dinasti Shafawi di awal abad XVI, mazhab Syiah telah menjadi bagian integral dan dominan dalam kehidupan masyarakat Iran. Mazhab Syiah menemukan momentumnya dalam mempengaruhi struktur sosial dan pemerintahan bangsa Iran ketika revolusi Islam Iran tahun 1979 meletus dan menumbangkan kekuasaan monarki Iran yang telah bertahan selama 25 abad. Mazhab Syiah memperlihatkan pengaruhnya dengan menjadi basis ideologi dan perangkat sistem sosial dan politik negara Iran. Sistem Wilayah al-Faqih merupakan sistem

²⁵ *Ibid* hal.134

politik negara Iran yang berbentuk Republic Islam. Kekuasaan tertinggi berada ditangan ulama sebagai pemimpin spiritual yang disebut dengan rahbar. Struktur pemerintahan Wilayah al-Faqih terpusat di tangan rahbar namun dalam pelaksanaannya berbentuk trias politica yang terdiri atas 3 badan legislative (Parlemen, Dewan Ahli, dan Majelis Ahli), kekuasaan eksekutif di tangan presiden, dan kekuasaan yudikatif di tangan mahkamah Agung atau Dewan Tertinggi Peradilan Nasional. Selain itu ada Dewan Revolusi, Dewan politik dan ekonomi Revolusi, dan Pemimpin Agama yang berfungsi sebagai administrator local.²⁶

B. Rasa Kebersamaan Budaya Iran dan Tiongkok

Hubungan antara Iran dan Tiongkok dapat dikatakan sebagai hubungan yang telah lama terjalin, interaksi kedua negara sudah dimulai dari masa kuno, dimana ini dapat dilihat dari jalur sutra kuno yang menjadi ciri dari hubungan kedua negara, dan juga dapat dikatakan sebagai hubungan yang baru karena hubungan resmi yang terjalin antara kedua negara dibangun pada tahun 1971.²⁷

Tiongkok dan Iran adalah pewaris dari dua peradaban kuno, sebuah fakta yang membentuk interaksi dan mewarnai indra identitas dan tempat para pemimpin mereka di dunia saat ini. Pandangan tentang hubungan bilateral Iran dan Cina tidak hanya cenderung menekankan pada berbagai rasa kebesaran budaya, tetapi juga karena rasa telah menjadi korban oleh kekuatan Barat. Pemimpin di kedua negara telah merangkul narasi sejarah yang mencirikan sistem internasional sebagai ketidakadilan dan didominasi oleh kekuatan Barat. Para pemimpin Tiongkok dan Iran berusaha untuk mempertahankan legitimasi rezim mereka sendiri dalam menghadapi sistem internasional yang dibentuk oleh konsep-konsep kedaulatan terbatas dan universalitas hak asasi manusia. Setelah kekuatan

²⁶ *Ibid*

²⁷ (Shariatina & Aziz, 2017)

besar, Cina dan Iran direduksi menjadi negara semi-kolonial pada awal abad ke-20. Sementara Iran secara efektif dibagi menjadi "zona pengaruh" oleh Rusia dan Inggris Raya pada abad ke-19, Tiongkok mengalami serangkaian kekalahan militer yang menyakitkan oleh negara-negara Barat yang memimpin. Rezim komunis Tiongkok, yang dibentuk oleh revolusi pada tahun 1949, telah berada di bawah berbagai sanksi internasional yang dipimpin AS untuk sebagian besar keberadaannya.²⁸

Inggris dan Amerika Serikat memaksa Iran untuk mengejar kepentingan Barat sejak awal 1940-an, pertama dengan memaksa Reza Pahlavi untuk mundur dari kekuasaan demi putranya Mohammad Reza, dan kemudian dengan melakukan kudeta terhadap Perdana Menteri Iran yang populis Mohammed Mossadegh pada tahun 1953. Sebagai konsekuensinya, banyak orang Iran datang untuk melihat kekuatan Barat sebagai tanggung jawab atas semua kekurangan kegagalan rezim Pahlevi. Di sisi Tiongkok selama periode yang sama, sanksi pimpinan Amerika Serikat terhadap rezim komunis di Beijing digunakan oleh para pemimpin Tiongkok untuk menggambarkan Barat sebagai musuh rakyat Tiongkok. Hubungan Iran dengan Tiongkok tidak terlalu penting selama pemerintahan Pahlevi. Sebelum revolusi 1979, hubungan dengan Tiongkok dipertahankan seminimal mungkin, sebagian besar karena tekanan AS terhadap Iran untuk membatasi hubungan ekonomi dan diplomatik dengan Tiongkok sebagai negara komunis. Namun, sebelum penggulingannya, Shah berusaha meningkatkan hubungan dengan Tiongkok untuk menciptakan kebijakan luar negeri yang lebih independen, dan keprihatinan bersama atas tindakan Soviet di Tengah, Selatan, Tenggara, dan Asia Timur mendorong Iran dan Tiongkok mengambil langkah-langkah tentatif menuju kerja sama yang lebih besar.²⁹

²⁸ (Harold & Nader, 2012, p. 2)

²⁹ *Ibid*

Namun, Republik Islam Iran yang menggantikan Shah pada awalnya curiga terhadap niat Cina dan awalnya menyerahkan Cina ke kategori kekuatan besar yang berusaha mengeksploitasi Iran. Penerus langsung Mao Zedong sebagai Ketua Partai Komunis Tiongkok, Hua Guofeng, adalah salah satu pejabat asing terakhir yang bertemu dengan Shah sebelum runtuhnya rezimnya, dan pemimpin revolusioner Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, tidak ingin memaafkan pelanggaran. Pejabat Republik Rakyat Tiongkok (RRC), bagaimanapun, segera melakukan upaya substansial untuk menjangkau Republik Islam Iran baru, memperpanjang pengakuannya hanya tiga hari setelah didirikan. Secara bertahap, Tiongkok mampu meningkatkan hubungannya dengan Iran yang revolusioner melalui diplomasi yang terampil dan penjualan senjata selama Perang Iran-Irak, mendapatkan syukur Teheran selama bertahun-tahun yang akan datang.³⁰

Faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan kerja sama Iran dan Tiongkok selama tahun 1980-an yaitu, Tiongkok menghentikan dukungannya terhadap komunisme revolusioner selama periode ini, karena hal tersebut menimbulkan sedikit ancaman ideologis terhadap Republik Islam Iran, yang dengan sendirinya memerangi kekuatan kiri pada tahun-tahun awal revolusi. Kemudian, kebijakan revolusioner Iran mengisolasinya dari bagian dunia lainnya, termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet serta sebagian besar dunia Arab. Selanjutnya, rezim di Cina dan Iran mengambil alih kekuasaan melalui revolusi-revolusi kejam melawan rezim-rezim pro-Amerika, dan kedua rezim itu dengan keras menentang dominasi sistem internasional Barat. Cina, pengeksport minyak bersih pada 1980-an, memandang hubungannya dengan Iran sebagai cara untuk meningkatkan pengaruhnya di wilayah yang secara geostrategis penting yang didominasi oleh Amerika Serikat. Selain itu, Iran berguna bagi Tiongkok sebagai peluang ekspor

³⁰ *Ibid*

untuk senjata Tiongkok pada saat anggaran pengadaan militer Tiongkok yang kurang lancar. Dari sudut pandang Iran, meskipun Khomeini telah memproklamirkan niat untuk mengejar kebijakan luar negeri yang bukan Barat atau Timur, pertimbangan praktis, terutama isolasi Iran dan perangnya dengan Irak, akhirnya mendorong Iran untuk menerima kerja sama dengan Tiongkok. Waktu akan menunjukkan, Cina dalam banyak hal mitra asing yang ideal untuk Republik Islam Iran, tidak pernah memegang ambisi teritorial di Iran, tidak seperti kekuatan besar lainnya, seperti Rusia dan Inggris.³¹

Hubungan Cina-Iran pindah ke fase baru ketika tahun 1980-an berakhir dengan perubahan yang dekat dan penting terjadi di kedua negara. Bagi Iran, perang Iran-Irak berakhir pada 1988 diikuti pada tahun 1989 oleh kematian Khomeini dan asumsi kekuasaan oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan Presiden Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Sementara itu, penghancuran protes pro-demokrasi Tiongkok di Lapangan Tiananmen pada Juni 1989 akan memiliki efek jangka pendek dan panjang pada kebijakan luar negeri dan domestiknya. Kebijakan luar negeri dan domestik kedua negara menjadi lebih pragmatis selama tahun-tahun ini, bergerak menjauh dari tujuan revolusioner dogmatik menuju rekonstruksi ekonomi dan modernisasi militer, dan kedua negara tetap terisolasi oleh Amerika Serikat dan mitranya. Sebagai akibatnya, Iran dan Cina datang untuk bekerja sama lebih dalam pada masalah senjata dan energi. Mereka juga memperdalam kerjasama diplomatik untuk melawan tekanan AS dan Barat untuk meningkatkan hak asasi manusia dan kebebasan demokratis di kedua negara. Dukungan Iran untuk penindasan Tiongkok terhadap gerakan pro-demokrasi pada Juni 1989 membantu memperkuat hubungan. Pada 1992 dan seterusnya, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, Jiang Zemin memimpin percepatan laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Ketika ekonomi Tiongkok meledak, Tiongkok bergerak dari menjadi pengeksport minyak netto menjadi

³¹ *Ibid*

pengimpor netto pada tahun 1993, sebuah perkembangan yang sangat meningkatkan signifikansi Iran bagi Tiongkok. Pada saat yang sama, Amerika Serikat mengejar kebijakan "penahanan ganda" terhadap Iran dan Irak. Isolasi yang semakin meningkat di Iran dan kebutuhan akan energi dan kemitraan internasional yang semakin kuat membuat kedua negara semakin dekat. Selama periode yang sama, bagaimanapun, hubungan AS dan Tiongkok berulang kali mendekati konfrontasi terbuka, memuncak dalam konfrontasi atas keamanan di Selat Taiwan pada tahun 1996. Para pemimpin Cina menyadari bahwa istirahat bersih dengan Amerika Serikat akan membawa konsekuensi yang berbahaya bagi Tiongkok. Mengakui bahwa bantuan militer Tiongkok ke Iran semakin memperburuk hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat dan menempatkan tujuan Tiongkok untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang cepat berisiko, kepemimpinan Tiongkok memutuskan pada tahun 1997 untuk secara signifikan menurunkan hubungannya dengan Iran.³²

Akibatnya, Tiongkok menghentikan kerja sama terbuka di bidang-bidang penting, seperti program nuklir dan rudal. Tetapi perkembangan di akhir 1990-an dan awal 2000an membuka peluang dan insentif baru bagi Tiongkok untuk melanjutkan kerja sama tingkat tinggi dengan Iran. Pertama, Jiang Zemin berhasil mengkonsolidasikan cengkeramannya pada kekuasaan pada tahun 1997, sebagian melalui manajemennya yang terampil atas hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat, setelah itu dia dapat lebih sedikit khawatir tentang ketegangan dengan Amerika Serikat atas hubungan Cina dengan Iran yang mengganggu kendalinya.

Pada musim semi 1999, pemogokan udara AS yang salah di kedutaan Tiongkok di Beograd menyebabkan tekanan populer dan elit pada kepemimpinan Tiongkok untuk menjauhkan diri dari Amerika Serikat, membuat kerja sama dengan Republik Islam menjadi cara populer untuk menunjukkan ketidakpedulian Tiongkok terhadap

³² *Ibid* Hal. 4

kekhawatiran AS. Kemudian, pada akhir tahun 2001, akses Cina ke Organisasi Perdagangan Dunia menghapus sumber daya AS atas Tiongkok terkait Iran, karena Amerika Serikat sebelumnya dapat mengancam untuk memblokir akses Cina ke badan perdagangan global jika bekerja sama dengan Iran. Akhirnya, setelah penemuan program pengayaan uranium rahasia Iran pada tahun 2002, perusahaan-perusahaan Barat mulai menarik diri dari Iran dan pemerintah Barat mulai meningkatkan tekanan pada Republik Islam, membuka peluang baru bagi perusahaan dan diplomat Tiongkok untuk membangun hubungan ekonomi dan strategis untuk Teheran. Jadi, di awal tahun 2000an, hubungan Cina-Iran mulai jatuh tempo ke masa yang seperti sekarang ini. Tekanan AS terhadap Rusia, Jepang, Korea Selatan, India, dan Eropa untuk mengurangi perdagangan dan investasi dengan Iran terkait program nuklirnya memberi Tiongkok tangan yang lebih bebas untuk terlibat dalam pasar domestik Iran yang kurang terlayani dan mengembangkan sumber energinya³³

Di bawah kepemimpinan baru Hu Jintao dan Wen Jiabao, Cina tidak menekankan hubungan yang relatif lebih hangat dengan Amerika Serikat dan Barat yang telah mencirikan tahun-tahun Jiang Zemin yang mendukung penekanan tujuan seperti stabilitas internal dan sosial. Kepemimpinan Cina juga mengejar kebijakan ekonomi keluar, yang berfokus pada mendorong investasi dalam industri energi dan pertambangan global. Hubungan perdagangan dan investasi Iran dan Tiongkok berkembang sangat pesat, sehingga pada 2007 Cina telah menjadi mitra dagang nomor satu Iran.³⁴

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid* Hal.5

C. Kebijakan Luar Negeri Iran

Kebijakan luar negeri Iran adalah produk dari motivasi yang tumpang tindih, dan terkadang bertentangan. Beberapa adalah faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri Iran.

1. Presepsi Ancaman

Para pemimpin Iran tampaknya termotivasi oleh sebuah persepsi yaitu ancaman terhadap rezim mereka dan kepentingan nasional mereka yang ditimbulkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Terlepas dari pernyataan oleh para pejabat Amerika Serikat bahwa AS tidak mencari perubahan rezim di Iran, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamene'i telah berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak pernah menerima revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1971 dan berupaya untuk membatalkannya melalui dukungan untuk oposisi domestik kepada rezim, penerapan sanksi ekonomi, dan dukungan untuk musuh-musuh regional Iran seperti Israel dan Arab Saudi. Ayatollah Ali Khamene'i juga mengatakan bahwa peningkatan hubungan dengan Amerika Serikat dan Barat pada umumnya akan membuka Iran, sehingga budaya barat dengan mudah akan masuk, dimana perilaku sosial Barat yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam Iran. Para pemimpin politik dan militer Iran menyatakan bahwa dengan adanya kehadiran militer AS yang besar di wilayah Teluk Persia dan di negara-negara lain di sekitar Iran mencerminkan sikap AS dan niat untuk menyerang Iran jika Iran mengejar kebijakan yang Amerika Serikat anggap merugikan.³⁵

³⁵ (Katzman, *Iran's Foreign Policy*, 2016, p. 1)

2. Diplomasi

Kebijakan luar negeri Iran juga menggunakan alat diplomatik tradisional secara aktif. Iran memiliki Kementerian Luar Negeri yang aktif dan mempertahankan kedutaan atau perwakilan di semua negara yang memiliki hubungan diplomatik. Khamene'i jarang bepergian ke luar Iran sebagai Pemimpin Tertinggi, tetapi dia melakukannya selama masa kepresidenannya (1981-1989), termasuk ke pertemuan Majelis Umum AS di New York. Presiden Iran sejak itu, termasuk Presiden Rouhani saat ini, melakukan perjalanan secara teratur di dalam dan di luar kawasan dan menjamu para pemimpin asing di Teheran.³⁶

Iran secara aktif berpartisipasi atau berupaya untuk bergabung dengan banyak organisasi internasional yang berbeda, termasuk yang didominasi oleh anggota yang kritis terhadap kebijakan luar negeri dan dalam negeri Iran. Iran telah berusaha untuk bergabung dengan *World Trade Organization* (WTO) yang didominasi Amerika Serikat dan Eropa sejak pertengahan 1990-an. Prospeknya untuk diterima telah meningkat karena *Join Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) yang dilaksanakan. Iran juga mencari keanggotaan dalam organisasi regional seperti *south Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) dan *Shanghai Cooperation Organisation* (SCO) yang mengelompokkan negara-negara Asia Tengah dengan Rusia dan Cina. Iran adalah pengamat di SCO, dan pejabat dari beberapa negara SCO telah mengatakan bahwa JCPOA kemungkinan menghilangkan hambatan bagi Iran untuk mendapatkan keanggotaan penuh.³⁷

Iran berpartisipasi aktif dalam organisasi multilateral yang cenderung mendukung beberapa aspek ideologi Iran, seperti kritiknya terhadap pengaruh kekuatan besar terhadap negara-negara berkembang. Dari Agustus 2012 hingga Agustus 2015, Iran memegang kursi kepresidenan Gerakan

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

Non-Blok (NAM), yang memiliki sekitar 120 negara anggota dan 17 negara pengamat. Pada Agustus 2012, Iran menjadi tuan rumah KTT tahunan GNB.³⁸

Iran adalah pihak dari semua konvensi utama nonproliferasi, termasuk Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan Konvensi Senjata Kimia atau *Chemical Weapons Convention* (CWC). Iran menegaskan bahwa mereka telah mematuhi semua komitmennya berdasarkan konvensi ini, tetapi masyarakat internasional menyatakan bahwa mereka tidak memenuhi semua kewajiban NPT dan bahwa Iran perlu membuktikan bahwa program nuklirnya adalah untuk tujuan yang murni damai. Negosiasi antara Iran dan kekuatan internasional tentang masalah ini dimulai pada 2003 dan mencapai puncaknya dengan JCPOA Juli 2015. Iran telah berpartisipasi dalam negosiasi multilateral yaitu proses perundingan perdamaian di Wina yang dimulai pada akhir Oktober 2015 untuk mencoba menyelesaikan konflik sipil di Suriah. Pertemuan-pertemuan ini menandai pertama kalinya para pejabat tinggi Iran dan Arab Saudi berpartisipasi dalam pembicaraan multilateral. Namun, para pejabat AS mengatakan bahwa tujuan Iran dalam pertemuan ini adalah untuk merekayasa kelanjutan kekuasaan Asad alih-alih membangun transisi ke rezim baru.³⁹

1) Diplomasi dengan Tiongkok

Tiongkok merupakan salah anggota tetap dewan keamanan PBB dan juga termasuk dalam anggota P5+1 yaitu *Join Comprehensif Plan of Action* (JCPOA) merupakan pelanggan terbesar minyak Iran. Tiongkok juga pernah menjadi pemasok senjata konvensional canggih ke Iran, termasuk kapal-kapal patroli peluruh kendali, yang dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Iran atau Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) sendiri di Teluk Persia. Sebelum 2010, beberapa perusahaan Tiongkok telah memasok teknologi terkait Senjata Pemusnah Masal atau *Weapons of Mass Destruction* (WMD)

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid* Hal. 7-8

ke Iran. Selama proses rapat dewan keamanan PBB mengenai sanksi terhadap program nuklir Iran selama periode tahun 2006-2013, Tiongkok cenderung memperdebatkan sanksi yang tidak terlalu ketat dan lebih menghormati posisi Iran daripada Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Jerman dalam forum rapat.⁴⁰

Sebagai buntut dari Hari Implementasi JCPOA, Presiden Cina Xi Jinping memasukkan Teheran dalam kunjungan ke wilayah Timur Tengah. Perjalanannya ke Iran umumnya terfokus pada visi Tiongkok tentang koridor energi dan transportasi yang membentang di seluruh Eurasia yaitu One Belt, One Road, dan termasuk Iran. Bersamaan dengan implementasi JCPOA, dan khususnya kadaluwarsa dalam lima tahun dari larangan global AS untuk penjualan senjata ke Iran, ada kemungkinan bahwa Tiongkok dan Iran akan membahas pembelian yang dilakukan Iran dari sistem pertahanan buatan Tiongkok.⁴¹

Kepatuhan Tiongkok terhadap sanksi A.S. sangat penting bagi upaya A.S. untuk mengurangi pendapatan Iran dari penjualan minyak. Tiongkok memangkas pembelian minyak Iran dari sekitar 550.000 barel per hari pada akhir 2011. Karena Tiongkok adalah pembeli minyak Iran terbesar, pemangkasan oleh Tiongkok berdampak besar dalam mengurangi penjualan minyak Iran. Meskipun pengurangan pembelian minyak dari Tiongkok terjadi, tidak menjadikan hubungan yang terjalin antara Iran dan Tiongkok putus begitu saja meskipun banyak tekanan dari pihak luar terutama Amerika Serikat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pertemuan tingkat tinggi antara Iran dan Tiongkok yang terjadi pada tahun 2016.⁴²

⁴⁰ *Ibid* Hal.30

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*